

ANALISIS TERHADAP ARAH DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2005 – 2025

Mohamad Samsudin

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor
Jl. Nurul Iman No. 01 RT/RW. 01/01, Ds. Waru Jaya, Parung, Bogor
Email: m.34din@yahoo.co.id

Abstract

Indonesian development runs on the foundation of Indonesia's long-term vision, namely the realization of nation-states, modern Indonesia that is safe and peaceful, fair and democratic, and prosperous by upholding human values, independence and unity based on Pancasila and The 1945 Constitution. To realize this, education as a subsystem is one of the important aspects to be considered in its direction and purpose so that education is not merely an aspect of supporting Indonesia's development, but as a locomotive of development itself. Because in reality, education is one aspect of life that is run by being influenced by various external aspects that are interrelated with each other such as political, economic, socio-cultural, defense-security aspects, even ideology has a very strong influence on the continuity of education, and vice versa.

This paper aims to find out how the Long Term Development Plan (RPJP) is specifically regarding national education between 2005-2010 and 2010-2025. To achieve this goal, the author uses content analysis research using written documents that have been used as guidelines to determine the direction of the Indonesian government's policy in realizing national development.

The results of the research in this paper show that the development of national education in the future is based on the paradigm of developing Indonesian people as a whole. The humanitarian dimension includes the three most basic things, namely: cognitive, affective, and psychomotor. This is based on the desire to realize the education system as a strong and authoritative social institution to empower all citizens of Indonesia to develop into quality human beings so that they are able and proactively respond to the challenges of an ever-changing era.

Keywords: Direction, Purpose, National Education

Abstrak

Pembangunan Indonesia berjalan di atas landasan visi misi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (nation-state) Indonesia modern yang aman dan damai, adil, dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan itu semua, pendidikan sebagai sebuah subsistem menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan arah dan tujuannya sehingga pendidikan tidak hanya sekadar aspek pendukung pembangunan Indonesia semata, melainkan sebagai lokomotif dari pembangunan itu sendiri. Karena pada realitasnya bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dengan dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain seperti aspek politik,

ekonomi, sosial budaya, pertahanan-keamanan, bahkan ideologi sangat erat pengaruhnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, demikian pula sebaliknya.

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) khususnya mengenai pendidikan nasional antara tahun 2005-2010 dan 2010-2025. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan penelitian yang bersifat content analysis dengan menggunakan dokumen tertulis yang telah dijadikan pedoman menentukan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Hasil penelitian dalam makalah ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini dilandaskan pada keinginan terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kata Kunci: Arah, Tujuan, Pendidikan Nasional

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan, sehingga disadari bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi setiap individu warga negara. Oleh karena itu, faktor pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, berat pada awal millennium ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu adanya pendidikan yang tidak hanya mengedepankan perolehan kemampuan pemahaman teori semata pada lulusan, melainkan juga untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan individu dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik daripada teori. Keterampilan-keterampilan yang diperoleh dari hasil pola pendidikan harus menyentuh semua segi kehidupan baik secara individu maupun sosial anak, seperti *physical skill, intellectual skill, social skill, managerial skill*, dan lain-lain.¹

Dalam memetakan masalah pendidikan, perlu diperhatikan realitas pendidikan itu sendiri, yaitu pendidikan sebagai sebuah subsistem yang sekaligus juga merupakan suatu sistem yang kompleks. Gambaran pendidikan sebagai sebuah subsistem adalah kenyataan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan

¹ Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Management*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 34.

dengan dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain. Aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan-keamanan, bahkan ideologi sangat erat pengaruhnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, demikian pula sebaliknya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks menunjukkan bahwa pendidikan di dalamnya terdiri dari berbagai perangkat yang saling mempengaruhi secara internal sehingga dalam rangkaian proses *input-output* pendidikan, berbagai perangkat yang mempengaruhinya tersebut perlu mendapatkan jaminan mutu yang layak oleh berbagai *stakeholder* yang terkait.

Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Departemen Pendidikan selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Manusia seperti apa yang ingin dibangun? Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.² Untuk itulah, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun program-program pendidikan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

B. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025

Sebagai bangsa yang besar, kaya sumber daya alam, dan memiliki cita-cita dan tujuan, tentunya bangsa Indonesia tidak hampa dari cita-cita. Dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuannya tersebut diperlukan adanya suatu rencana jangka panjang yang disepakati oleh segenap komponen bangsa. Dulu kita memiliki yang namanya GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sekarang tidak lagi, namun kebutuhan akan arah pembangunan bangsa tetap ada. Oleh karena itu diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Penyusunan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Di dalam UU tersebut diatur bahwa rencana pembangunan

² John W. Santrock, *Educational Psychology II Edition*, McGraw-Hill Company, Inc. alih bahasa oleh Tri Wibowo, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 54.

jangka panjang merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 20 tahun, yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pemerintah telah menyampaikan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 kepada DPR RI dengan surat Presiden RI No. R-01/PU/III/2005 tertanggal 18 Maret 2005. Untuk pembahasan RUU tersebut dengan DPR RI, Presiden menugaskan Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas sebagai wakil Pemerintah.³

Sesuai Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.⁴

1. Visi Pendidikan Nasional

Pembangunan Indonesia di masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (*nation state*) Indonesia modern yang aman dan damai, adil, dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kerangka visi jangka panjang yang termuat dalam dokumen “Membangun Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera”, Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Yusuf Kalla merancang pembangunan Indonesia pada tahun 2005-2009 mengarah pada:⁵

- a. terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai;
- b. terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; dan
- c. terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan, yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang

³ Lihat salinan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pokok-Pokok Penjelasan Pers Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 16 Januari 2007.

⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4 ayat (1)

⁵ Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Yusuf Kalla, *Membangun Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera*, (ttp: tp, 2004). h. 69

berfungsi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu:

- a. **afektif** yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis;
- b. **kognitif** yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. **psikomotorik** yang mencerminkan pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.⁶

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seharusnya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

Selain hal tersebut di atas, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga Negara sebagaimana diatur dalam pasal 28A

⁶ Departemen Agama RI, *Kurikulum 2004 Pedoman Khusus Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Kemenag, 2004), h. 32.

Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi memperoleh kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.

Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut:⁷

“Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.”

Dari Visi Pendidikan Nasional tersebut di atas, Departemen Pendidikan berhasrat pada tahun 2025 agar pendidikan nasional menghasilkan: *“Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna).”*⁸ Terdapat dua dimensi pokok yang menjadi tujuan pendidikan nasional di sini, yaitu cerdas dan kompetitif. Adapun yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetitif adalah manusia-manusia unggul yang memiliki daya saing di semua aspek kehidupan di masa depan.

Departemen Pendidikan memberikan deskripsi yang lengkap tentang apa yang dimaksud dengan insan cerdas komprehensif dan kompetitif.⁹ Adapun yang dimaksud dengan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif meliputi:

a. Cerdas spiritual

Kecerdasan spiritual ini dapat dilihat dari bagaimana seseorang mengaktualisasikan dirinya melalui olah hati/kalbu untuk

⁷ Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian Umum

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 -2009* (Jakarta: Kemendiknas, 2005), h. 5.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 -2009*,...h. 13. Lihat juga Kemendiknas, *Perangkat Peningkatan Mutu Pendidikan untuk SMA dan MA Seri 2*, (Jakarta: Bina Tama Raya, 2009), h. 8.

menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.

b. Cerdas emosional & sosial

Kecerdasan emosional ini dapat dilihat dari bagaimana seseorang mengaktualisasikan dirinya melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengapresiasikannya. Adapun Kecerdasan sosial dapat dilihat dari bagaimana seseorang mengaktualisasikan dirinya melalui interaksi sosial yang membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan dalam masyarakat dan bernegara, serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

c. Cerdas intelektual

Kecerdasan intelektual seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia mampu mengaktualisasikan dirinya melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual ini juga dapat ditunjukkan dengan daya yang kritis, kreatif, dan imajinatif.

d. Cerdas kinestetis

Kecerdasan kinestetis seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia mampu mengaktualisasikan dirinya melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas, sehingga menjadi insan adiraga.

Sedangkan makna Insan Indonesia Cerdas Kompetitif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan
- b. Bersemangat juang tinggi
- c. Mandiri
- d. Pantang menyerah
- e. Pembangun dan pembina jejaring
- f. Bersahabat dengan perubahan
- g. Inovatif dan menjadi agen perubahan
- h. Produktif
- i. Sadar mutu
- j. Berorientasi global
- k. Pembelajar sepanjang hayat

Visi Departemen Pendidikan di atas lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiaannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimal. Bahkan di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut. Namun demikian, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer teknologi yang biasanya menyertai investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan investasi tersebut.

Pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif. Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan harus menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Misi Pendidikan Nasional

Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- d. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut, Departemen Pendidikan untuk Tahun 2005-2009 menetapkan misi sebagai berikut: “*Mewujudkan Pendidikan yang Mampu Membangun Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif.*” Untuk mewujudkan misi tersebut, Departemen Pendidikan menetapkan beberapa strategi dan program yang disusun berdasarkan skala prioritas. Salah satu bentuk dari prioritas tersebut adalah penggunaan dana APBN/APBD dan dana masyarakat yang lebih ditekankan pada:¹¹

- a. upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
- b. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
- c. peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

3. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang

Rencana pembangunan pendidikan jangka panjang ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penentuan penekanan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional jangka menengah serta memastikan tercapainya visi dan misi departemen

¹⁰ Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian Umum. Bandingkan dengan Kemendiknas, *Perangkat Peningkatan Mutu Pendidikan untuk SMA dan MA Seri 2*, (Jakarta: Bina Tama Raya, 2009), h. 11.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 -2009* (Jakarta: Kemendiknas, 2005), h. 16.

dengan penurunan program kerja yang realitis, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dalam rencana pembangunan jangka panjang Departemen Pendidikan Nasional 2005-2025, digunakanlah empat tema strategis pembangunan pendidikan, yaitu:

- a. peningkatan kapasitas dan modernisasi;
- b. penguatan pelayanan;
- c. daya saing regional;
- d. daya saing internasional.¹²

Setiap tema strategis pembangunan pendidikan jangka panjang di atas, akan diturunkan dalam program kerja departemen sesuai kebijakan pembangunan jangka menengah yang menekankan pada tiga tantangan utama, yaitu:

- a. pemerataan dan perluasan akses;
- b. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing;
- c. peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.

Berikut adalah penjabaran mengenai rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan untuk periode 2005-2025.

a. Periode 2005-2010: *Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi*

Lima tahun pertama dalam rangka rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) guna terciptanya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dalam tatanan masyarakat lokal dan global difokuskan pada peningkatan daya tampung satuan pendidikan yang ada. Terlihat dalam analisa situasi pendidikan nasional sampai dengan saat ini bahwa kebutuhan/*demand* melebihi sediaan/*supply* sarana dan prasarana pendidikan. Terlebih jika diperbandingkan antara pola sebaran penduduk Indonesia dan keberadaan infrastruktur pendidikan yang masih menuntut perhatian lebih. Apabila telah terjadi keseimbangan yang efektif antara kuantitas manusia Indonesia dengan kapasitas pendidikan nasional maka poin utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah tercapai.

Salah satu kendala dalam pemerataan pendidikan di Indonesia adalah cakupan geografisnya yang luas. Hal ini memerlukan modernisasi pada sistem dan jaringan informasi menggunakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang

¹² Kemendiknas, *Perangkat Peningkatan Mutu Pendidikan untuk SMA dan MA Seri 2*, Jakarta: Bina Tama Raya, 2009, h. 65.

memadai. Luasnya wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan luasnya sebaran penduduknya dapat dipersatukan dengan jaringan teknologi informasi. Modernisasi dengan menggunakan TIK juga dapat meningkatkan sistem pengawasan pada implementasi program-program pendidikan. Dilengkapi dengan sistem informasi manajemen yang tangguh, tantangan untuk mewujudkan sistem tata kelola yang sehat, efisien, dan akuntabel akan lebih mudah dicapai. Citra Depdiknas sebagai salah satu institusi pemerintah pun dapat terangkat.

Tema pokok pembangunan pendidikan nasional periode tahun 2005-2010 ini yang berkonsentrasi pada kapasitas dan modernisasi sangat mendukung program pemerintah, yaitu *pendidikan untuk semua*. Pemerataan akses pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat dan ke seluruh pelosok negeri akan mempertinggi APS (Angka Partisipasi Sekolah) dan mengurangi angka buta aksara sehingga IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia akan semakin baik. Perencanaan, proses, dan evaluasi kerja sesuai dan berkesinambungan akan mewujudkan transformasi rakyat Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Kesempatan dan komitmen terhadap tata nilai, terbentuknya sistem, dan prosedur kerja, tersusun dan tertatanya produk hukum dan struktur organisasi, meningkatnya akuntabilitas publik, dan sasaran-sasaran lainnya yang relevan akan sangat diperlukan guna mendukung tema strategis pada periode ini.

b. Periode 2010-2015: *Penguatan Pelayanan*

Tema strategis pada periode tahun 2010-2015 ditekankan pada pembangunan penguatan pelayanan. Setelah rasio kebutuhan dan sediaan sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal, fokus selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan agar relevan dan berdaya saing. Sasaran dan program-program kerja yang terkait harus mampu menjawab tuntutan mutu dari kapasitas pendidikan yang semakin besar dan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah yang semakin dewasa.

Strategi penguatan pelayanan ini merupakan milestone (keberhasilan) peralihan fokus atau penekanan dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Didampingi akses pendidikan yang semakin mudah dan akuntabilitas publik yang

semakin transparan, tema mutu layanan pendidikan ini akan menciptakan para penggerak pembangunan menuju visi negara dan bangsa Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Sasaran-sasaran pendukungnya antara lain implementasi dan operasi yang optimal terhadap tata nilai, sistem dan prosedur (sisdur), dan koordinasi kerja yang telah terstruktur. Pada periode ini pula, Departemen Pendidikan Nasional diharapkan menjadi *benchmark technocracy* atau teladan di antara institusi pemerintah lainnya.

c. Periode 2015-2020: Daya Saing Regional

Salah satu elemen pada deklarasi visi pendidikan nasional tahun 2025 adalah kompetitif pada tingkatan global. Oleh karena itu, pada periode pembangunan tahun 2015-2020 difokuskan pada kualitas pendidikan yang memiliki daya saing regional pada tingkat ASEAN terlebih dahulu. Standar mutu yang berkesinambungan pada periode ini diharapkan relevan dengan pasar regional ASEAN. Standar tersebut harus berdasarkan pada *benchmarking* yang obyektif dan realitis.

Program kerja yang berdasarkan pemahaman terhadap perkembangan kebutuhan pasar regional menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai daya saing yang diinginkan. Kegagalan dalam menciptakan mutu pendidikan yang tinggi sesuai dengan kebutuhan atau yang tidak memiliki daya saing hanya akan mencetak angka pengangguran baru.

Program manajemen pendidikan melalui standardisasi, penjaminan mutu, kemudian akreditasi satuan atau program pendidikan yang telah mulai dilakukan sebelumnya akan lebih difokuskan dalam periode ini. Semua itu dilakukan tanpa mengesampingkan program-program sebelumnya yang berhubungan dengan kemudahan akses pendidikan dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaannya.

Sasaran-sasaran pembangunan yang melandasi kebijakan strategis pada periode ini meliputi terbentuk dan beroperasinya sistem layanan dan standar tingkat ASEAN, citra Depdiknas yang telah lintas Negara ASEAN, kerja sama antara Negara-negara ASEAN terutama dalam bidang pendidikan yang semakin mantap, dan hal-hal lain yang relevan. Harapannya manusia Indonesia pada akhir periode ini sudah bisa menjadi titik pusat gravitasi sosial ASEAN sebagai sebuah entitas sosiokultural.

d. Periode 2020-2025: *Daya Saing Internasional*

Menjelang perwujudan visi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang ditargetkan terwujud pada tahun 2025 ini, maka dalam periode pembangunan pendidikan nasional tahun 2020-2025 dicanangkan pencapaian nilai kompetitif secara internasional. Setelah pada RPJM lima tahun sebelumnya, pencapaian tingkatan mutu pendidikan nasional Indonesia telah relevan dan memiliki daya saing di tingkat regional ASEAN, maka pada periode ini tingkatan yang ingin dicapai telah berkelas dunia.

Semakin mengglobalnya industri dan jasa, termasuk jasa pendidikan skala nasional dengan mutu internasional, sehingga pendidikan nasional bangsa Indonesia minimal menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat terus terjaga keasriannya di negeri sendiri. *General Agreement on Trade in Service (GATS)* adalah contoh komitmen bangsa-bangsa di dunia dalam menyelenggarakan globalisasi perdagangan jasa dan industri termasuk pula jasa pendidikan.

Dengan menuju terciptanya standar mutu pendidikan berkelas internasional, Depdiknas harus mempunyai sistem layanan standar internasional, citra yang kuat, dan mewakili visi pembangunan Indonesia, dan kerja sama yang erat dengan bangsa-bangsa lain terutama di bidang pendidikan. Sasaran-sasaran tersebut dan lainnya yang dijabarkan dari kebijakan strategis pada periode ini akan membawa kepada terwujudnya visi Departemen Pendidikan Nasional di tahun 2025.

Tonggak-tonggak keberhasilan (*milestones*) dalam rentang waktu lima tahunan merupakan bagian dari rencana jangka panjang pembangunan pendidikan tahun 2005 sampai tahun 2025. Tonggak-tonggak keberhasilan mengejewantahkan kebijakan strategis proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berkesinambungan sesuai dengan kondisi yang ada (*existing condition*) untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan (*excepted condition*). Semua tantangan dari segi akses, mutu, dan akuntabilitas pun dapat terjawab oleh program-program kerja yang relevan dengan kebijakan pada tiap periode. Dengan demikian, visi insan Indonesia cerdas dan kompetitif berdasarkan sistem pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global dapat terwujud pada tahun 2025.

C. Penutup

Pembangunan Indonesia di masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (*nation state*) Indonesia modern yang aman dan damai, adil, dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik.

Visi Pendidikan Nasional adalah “*Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.*” Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut; Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan: *Insan Indonesia Cerdas Dan Kompetitif (Insan Kamil / Insan Paripurna)* yang meliputi: Cerdas spiritual, Cerdas emosional & sosial, Cerdas intelektual, Cerdas kinestetis.

Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah “*Mewujudkan Pendidikan Yang Mampu Membangun Insan Indonesia Cerdas Komprehensif Dan Kompetitif.*” Dalam rencana pembangunan jangka panjang Departemen Pendidikan Nasional 2005-2025, digunakanlah empat tema strategis pembangunan pendidikan, yaitu: (1) *peningkatan kapasitas dan modernisasi*; (2) *penguatan pelayanan*; (3) *daya saing regional*; dan (4) *daya saing internasional*.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Kurikulum 2004 Pedoman Khusus Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta: 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 -2009*. Jakarta: Kemendiknas, 2005.
- Kemendiknas, *Perangkat Peningkatan Mutu Pendidikan untuk SMA dan MA Seri 2*, Jakarta: Bina Tama Raya, 2009.
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Pokok-Pokok Penjelasan Pers Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. *Education Management*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Santrock, John W., *Edicational Psychology II Edition*, McGraw-Hill Company, Inc. alih bahasa oleh Tri Wibowo, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yudhoyono, Susilo Bambang, dan M. Yusuf Kalla. *Membangun Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera*. Tp., 2004.

Mohamad Samsudin